

MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Djuwairiyah¹, Abd. Muqit², Heni Listiana².

UNIB Sukorejo Situbondo, East Java, Indonesia. UIN Sunan Ampel Surabaya, East Java, Indonesia.
IAIN Madura, East Java, Indonesia.

Djuwairiyah.fawaid@gmail.com, b.abd.muqit@gmail.com, henilistianabisa@gmail.com

ABSTRACT: *Educational institutions are institutions that allow to organize a structured and traditional learning process. In order to improve the quality of education, educational institutions must not only meet the standard criteria for providing education, but also must be supported by adequate administration costs. The management of this education fund must be based on the principles of fairness, efficiency, transparency, and accountability. Regarding the implementation of responsible and professional duties, Allah swt. Affirmed: verily Allah has commanded all of you to give a mandate to his members.*

Keywords: *Financing Management, Quality of education.*

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.¹ Sedangkan oleh Muhammad Nasir dalam tulisan Idiologi Pendidikan Islam, pendidikan didefinisikan sebagai suatu pimpinan jasmani dan ruhani menuju kesempurnaan dan kelengkapan kemanusiaan dengan arti yang sesungguhnya.²

Secara terminologi, pendidikan adalah suatu proses perbaikan, dan penyempurnaan kemampuan dan potensi manusia, juga terkadang pendidikan disebut sebagai ikhtiar manusia untuk membimbing kepribadian, pemikiran, sikap tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan.³ Pendidikan juga disebut sebagai proses transformasi nilai serta pembentukan kepribadian dan bukan sekedar proses transfer ilmu, sehingga pendidikan lebih dari pada sekedar pengajaran, karena pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan kepribadian yang perhatian dan minatnya bersifat teknis.⁴ Karena sejatinya nilai tersebut merupakan landasan dan sumber terbentuknya budaya bangsa. Perjalanan

¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 4.

² *Ibid.*, 4.

³ Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), 15.

⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 4.

perkembangan budaya tersebut kemudian sebagai upaya manusia untuk mencapai kehidupan sejahtera, bahagia dan merata bagi seluruh warga.⁵

Oleh karena itu, budaya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama.⁶ Agama sendiri dapat diartikan sebagai petunjuk Tuhan yang mengandung tata nilai, pedoman, pembimbing, dan pendorong manusia dalam usaha menempatkan dirinya dalam keseluruhan, keseimbangan, dan keserasian dalam hubungan hidup manusia baik dengan dirinya sendiri, Tuhan, dan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup lebih baik.⁷ Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam UU RI No. 02 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II pasal 4, bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengakui serta bertakwa kepada-Nya, berbudi pekerti luhur, serta berpengetahuan dan memiliki keterampilan, sehat jasmani dan rohani.⁸

Pendidikan Nasional, dalam tujuannya untuk membentuk dan meningkatkan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartaba.⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan agama diberikan kepada seluruh warga Negara dari semua tingkatan (jenjang), jalur sekolah (negeri maupun swasta).¹⁰

Proses kependidikan untuk bisa sampai pada tujuan, diperlukan sebuah institusi atau kelembagaan pendidikan sebagai suatu sistem yang memungkinkan keberlangsungan pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan.¹¹ Lembaga pendidikan merupakan suatu institusi, media, forum atau situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran secara terstruktur maupun secara tradisi.¹²

Di samping adanya institusi pendidikan, ada beberapa kriteria dan standat pendidikan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas kependidikan, maka tidak akan pernah terlepas dari faktor pembiayaan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Pasal 48 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Di samping itu terkait dengan pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab dan profesional, Allah swt. berfirman:

⁵ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 23.

⁶ *Ibid.*, 23.

⁷ *Ibid.*, 24.

⁸ UU RI No. 02 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II pasal 4.

⁹ PP. RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB II pasal 4.

¹⁰ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, 27.

¹¹ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 83.

¹² Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), 121.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. ١٣

Sesungguhnya Allah memerintah kepada kamu sekalian untuk memberikan amanat kepada ahlinya.¹⁴

METODE/METHOD

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

1. Manajemen Keuangan

Manajemen adalah suatu proses atau sebuah kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan sekelompok orang menuju suatu tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan yang pelaksanaannya disebut *managing* (pengelolaan), sedangkan pengelolanya disebut manager atau pengelola.¹⁵

Menurut Suad Husnan, manajemen keuangan adalah berkaitan dengan pengumpulan dan pengalokasian dana untuk pembiayaan atau pembelanjaan dalam berbagai kegiatan secara efektif dan efisien.¹⁶

Sedang Van Horne menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan berbagai tujuan secara menyeluruh.

Pada dasarnya manajemen keuangan bukan hanya dibutuhkan oleh sebuah organisasi yang orientasinya pada profit margin, namun juga konsep serta teorinya dapat diterapkan pada individu dan juga pada organisasi non-profit yang dikelola oleh pemerintah atau swasta.¹⁷

2. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Konsep manajemen dibangun atas dasar pemahaman yang komprehensif tentang konsep biaya. Nanang Fattah dalam Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini mendefinisikan biaya pendidikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana prasana pendidikan, pengadaan alat-alat pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, dan hal lain yang berkaitan dengan kependidikan. Secara teoritis konsep biaya pendidikan sama dengan di bidang lain, yaitu lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen

¹³ QS. *al-Nisa*>' (4): 58.

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 128.

¹⁵ George R. Terry dan Leslie W Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 1.

¹⁶ Ni Luh Putu Wiagustini, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Bali: Udayana University Press, 2010), 5.

¹⁷ *Ibid.*,5

jasa pendidikan yang menghasikan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang lulusan.

Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan, mengalokasikan sumber dana dan mendistribusikannya sebagai fasilitas pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien.¹⁸

Manajemen pembiayaan merupakan keputusan secara keseluruhan aktivitas mengenai usaha dalam memperoleh dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen yang menuntut agar dalam mengelola dana memperhatikan dan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.¹⁹

3. Bidang Manajemen Fungsional

Sebuah organisasi merupakan sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan satu dengan yang lainnya, masing-masing unsur tidak dapat berdiri dan berjalan sendiri. Manajemen hubungannya dengan organisasi dapat diartikan sebagai pengelolaan untuk mengerjakan pekerjaan dalam mencapai tujuan dibutuhkan kerjasama dengan orang tertentu dalam sebuah organisasi. Di sini kemudian manajemen diartikan kerjasama yang dikelola untuk mencapai tujuan.²⁰

Oleh karena itu bidang fungsional manajemen yang tidak bisa dipisahkan, namun harus dibedakan menjadi berikut ini:²¹ *Pertama*, Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan unsur terpenting dari keberhasilan suatu organisasi, oleh karena di dalamnya berisi tata aturan mengenai karyawan. Karena itu, manajer (pengelola) tidak boleh menganggap karyawan sebagai faktor biaya, tapi harus melihat dari sisi kemanusiaan. *Kedua*, manajemen operasi/produksi merupakan kegiatan yang mengatur mengenai hal penciptaan dan penambahan kegunaan, fungsi, manfaat (*utility*) dari barang atau jasa. *Ketiga*, manajemen pembelanjaan/keuangan diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan serta aktivitas penggunaan dalam hal mengatur serta mengelola dana tersebut agar efisien dan efektif. *Keempat*, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran melakukan 2 fungsi, yaitu merencanakan dan menerapkan rencana. Dalam melakukan fungsi perencanaan, seorang manajer/pengelola harus menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, juga cara agar bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai.

4. Tujuan Manajemen Keuangan

Pelaksanaan suatu manajemen harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan manajemen keuangan pendidikan untuk menggali dana keuangan pendidikan dari sumber-sumber dana pendidikan, dan dipergunakan secara efektif dan efisien, serta tidak melanggar aturan. Dalam hal ini, tujuan

¹⁸ Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, *Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 73-74.

¹⁹ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syariah Modern*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 39.

²⁰ AM. Kadarman, Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), 10.

²¹ *Ibid.*, 11-15.

manajemen keuangan pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang berhubungan dengan pendidikan sesuai dengan perencanaannya.

Secara umum tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah: 1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemakaian keuangan pendidikan, 2) meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi keuangan pendidikan, dan 3) meminimalisir penyalahgunaan anggaran.²²

Ditilik dari segi normatifnya, tujuan dari manajemen keuangan tidak lain adalah untuk memaksimumkan nilai dan kemakmuran masyarakat pendidikan.²³

5. Penganggaran Lembaga Pendidikan

Proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran disebut penganggaran. Anggaran sendiri oleh Nanang Fattah diartikan sebagai rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.²⁴

Ada beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi, di antaranya:²⁵ *Pertama*, sebagai alat perencanaan, yakni mengharuskan organisasi tahu apa yang akan dilakukan dan kemana arah kebijakan dibuat. *Kedua*, sebagai alat pengendalian sehingga dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya. *Ketiga*, sebagai alat kebijakan agar dapat menentukan arah kebijakan tertentu. *Keempat*, sebagai alat politik dapat melihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan. *Kelima*, sebagai alat koordinasi dan komunikasi agar dapat mengetahui apa yang akan dilaksanakan dan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing unit melalui dokumen anggaran yang komprehensif. *Keenam*, sebagai alat penilaian kinerja agar dapat menjadi ukuran yang bisa dijadikan patokan dari sebuah unit kerja telah mencapai suatu target, baik terlaksananya aktivitas maupun efisiensi biaya. *Ketujuh*, sebagai alat motivasi dapat dijadikan alat komunikasi dengan menjadikan nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

Selanjutnya model pelaporan keuangan yayasan menggunakan model pelaporan akuntansi dengan asumsi bahwa:²⁶ *Pertama*, entitas bisnis terpisah artinya yayasan dianggap suatu entitas bisnis terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya (UU No. 16 tentang Yayasan tahun 2001 Bab II Pasal 9 angka 1).²⁷ *Kedua*, Asumsi berkelanjutan, bahwa yayasan sebagai lembaga nirlaba dianggap akan senantiasa hidup dan beraktivitas. Artinya semua pencatatan dibuat dengan asumsi bahwa yayasan akan tetap beroperasi pada periode ke depan sepanjang tidak dinyatakan lain dalam

²² Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 92.

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Manajemen Keuangan: Teori, Aplikasi dan hasil Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, t,th), 9.

²⁴ Abu Bakar, Taufani C. Kurniatun, *Manajemen Pendidikan: Manajemen Keuangan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 258.

²⁵ Abu Bakar, Taufani C. Kurniatun, *Manajemen Pendidikan: Manajemen Keuangan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 259.

²⁶ Manahan Tampubolon, *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 187-188.

²⁷ Berbunyi: "Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal".

anggaran dasarnya. *Ketiga*, harga yang wajar, semua transaksi merupakan konsep dari model ideal, artinya sampai ditemukan bukti valid maka suatu transaksi dianggap sebagai dokumen dasar untuk pencatatan transaksi laporan keuangan. *Keempat*, pencatatan dalam satuan moneter artinya transaksi apa pun yang berpengaruh pada entitas yayasan harus diterjemahkan dalam satuan moneter. *Kelima*, ketepatan waktu, untuk dapat mengatakan suatu informasi tepat waktu atau terlambat maka dibutuhkan suatu tenggat waktu, maka apabila informasi diberikan setelah tanggal tenggat, informasi tersebut baru bisa dikatakan terlambat. *Keenam*, proses penandingan antara pendapatan dengan biaya. *Ketujuh*, konservatif atau kehati-hatian.

B. Prinsip dan fungsi pembiayaan pendidikan

1. Prinsip pembiayaan pendidikan

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan pasal 48, yaitu pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.²⁸ Secara garis besar ada lima prinsip dalam manajemen pembiayaan.

- a. Akuntabilitas (*accountability*), proses manajemen pembiayaan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, dari mana dana diperoleh dan bagaimana dana dipergunakan untuk kepentingan pendidikan.
- b. Transparan (*Transparency*), proses manajemen pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Prinsip ini direalisasikan dengan bentuk laporan pengelolaan dana kependidikan yang ada.
- c. Integritas (*Integrity*), pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan harus memiliki integritas, baik dari sistem yang dibangun maupun sumber daya manusia yang menjalankan.
- d. Konsistensi (*Consistency*), pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan yang telah ditetapkan. Konsistensi ini tetap memperhatikan dinamika dan perkembangan dunia pendidikan dan permintaan masyarakat pendidikan.
- e. Efektif dan Efisien, pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara efektif, efisien dan fokus pada tujuan yang hendak dicapai. Prinsip ini menjadi indikator produktifitas lembaga pendidikan.²⁹

Menurut Rusdiana ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan keuangan:

- a. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis.

²⁸ Manahan Tampubolon, *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 189.

²⁹ Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, *Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi*, 75-76, lihat Manahan Tampubolon, *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 189..

- b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan.
- c. Persesuaian dengan kemampuan.³⁰

2. Fungsi manajemen pembiayaan pendidikan

Manajemen diartikan sebagai suatu bentuk kerja, sehingga diperlukan seorang manajer untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka pelaksanaan kegiatan tersebut adalah fungsi dari manajemen yang terdiri dari beberapa unsur.³¹ *Pertama, Planning* atau perencanaan, yaitu untuk menentukan tujuan apa yang akan dicapai dari suatu periode tertentu yang akan datang disertai dengan suatu cara agar dapat mencapai tujuan tersebut.

Kedua, *Organizing* atau pengorganisasian, yaitu untuk mengelompokkan serta menentukan kegiatan sebagai pelaksanaan dengan pembagian serta penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. *Ketiga, Staffing/kepegawaian*, yaitu menentukan keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. *Keempat, Motivating/pemotivasian*, yaitu memberikan pengaruh dengan cara mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan. *Kelima, Controlling* atau pengawasan, yaitu dengan mengukur pelaksanaan untuk mencapai tujuan, merangkum sebab penyimpangan dan mengambil tindakan preventif untuk langkah evaluasi dan perbaikan.

Dalam fungsi pembiayaan pendidikan setidaknya ada tiga:

- a. Optimalisasi sumber dana, fungsi manajemen pembiayaan pendidikan adalah optimalisasi sumber pembiayaan yang diperoleh, sehingga mengantarkan pada lulusan pendidikan yang berkualitas.
- b. Alokasi, alokasi pembiayaan pendidikan merupakan proses financial decision. Dan kebijakan dalam menentukan alokasi pembiayaan pendidikan ini harus mengedepankan program prioritas dalam sebuah proses pendidikan.
- c. Distribusi, distribusi merupakan proses penyaluran dana sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan.³²

C. Ruang lingkup pembiayaan pendidikan

Manajemen setidaknya mempunyai tiga ruang lingkup, yaitu perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan (*akunting*), dan tahap penilaian atau evaluasi (*auditing*).³³

1. Perencanaan keuangan (*budgeting*)

Penganggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan penyusunan anggaran. *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan

³⁰ Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 229.

³¹ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, 9-12.

³² Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, *Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi*, 74.

³³ Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, *Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi*, 76.

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam waktu tertentu. Dalam menentukan biaya satuan pendidikan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro.

Pendekatan makro didasarkan perhitungan keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro didasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponen pendidikan yang digunakan oleh murid.

Menurut Mulyana dengan mengutip pendapat Morphet dalam Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pengangggaran biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran belanja harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
- b. Mengembangkan sistem perencanaan yang efektif.
- c. Memonitor dan menilai lulusan pendidikan secara terus menerus dan berkesenambungan sebagai bahan perencanaan berikutnya.

2. Pelaksanaan (*akunting*)

Akunting digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Pelaksanaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Keduanya ini harus dibukukan sesuai prosedur pengelolaan selaras dengan dengan ketentuan atau kesepakatan bersama.

3. Tahap penilaian atau evaluasi (*auditing*).

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian barang bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Secara sederhana pengawasan terdiri dari memantau (*monitoring*), menilai dan melaporkan. Proses evaluasi ini harus dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan manajemen keuangan berjalan efektif dan efisien serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya.³⁴

D. Peningkatan mutu pendidikan dengan manajemen pembiayaan pendidikan

1. Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah peningkatan berasal dari kata dasar tingkat yang berarti tinggi rendah martabat kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban dan sebagainya.³⁵

³⁴ Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, *Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi*, 77-78.

³⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1198.

Sedangkan pendidikan adalah sebuah usaha yang sangat ditentukan oleh cara, sifat, dan proses pengambilan keputusan sehingga gambarannya terdapat banyak komponen yang ikut berproses di dalamnya.³⁶ Pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Azyumardi Azra, pendidikan diartikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.³⁷ Sedangkan oleh Muhammad Nasir dalam tulisan Idiologi Pendidikan Islam, pendidikan didefinisikan sebagai suatu pimpinan jasmani dan ruhani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya.³⁸ Secara terminologi, pendidikan adalah suatu proses perbaikan, dan penyempurnaan kemampuan dan potensi manusia, juga terkadang pendidikan disebut sebagai ikhtiar manusia untuk membimbing kepribadian, pemikiran, sikap tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan.³⁹

Kualitas atau mutu dapat didefinisikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan.⁴⁰ Dengan kata lain bahwa mutu adalah sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan.⁴¹

Mutu pendidikan pada dasarnya mencakup keseluruhan proses pendidikan, yaitu input, proses dan output pendidikan. Untuk menghasilkan input, proses dan output pendidikan yang bermutu harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan benar sehingga berdampak kepada efisiensi pelaksanaan program, dan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.⁴²

Jadi, kualitas pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif.

Menurut Zamroni, peningkatan mutu pendidikan adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan belajar dengan tujuan agar target pendidikan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.⁴³

³⁶ Manahan Tampubolon, *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 11.

³⁷ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 4.

³⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam:....*, 4.

³⁹ Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), 15.

⁴⁰ Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam:....*, 295.

⁴¹ Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2011), 56.

⁴² Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Hand Book of Education Management; Teori dan Praktek Pengelolaan Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 386.

⁴³ Zamroni. *Meningkatkan Mutu Sekolah*. (Jakarta: PSAP Muhamadiyah, 2007), 2.

Jadi peningkatan mutu pendidikan adalah kemajuan yang dihasilkan dalam proses pendidikan sehingga menghasilkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat pendidikan sebagaimana yang telah ditargetkan.

Layaknya sebagai organisasi, maka pendidikan memerlukan adanya sebuah manajemen agar bisa mencapai tujuannya serta meningkatkan pendidikan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan yang harmonis dan terarah. Manajemen pendidikan merupakan hal vital dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat mencapai tujuan, meningkatnya kualitas, efektifitas, dan efisiensi pendidikan. Maka dari itu untuk memicu hasil (*out put*) yang berkualitas, maka manajemen pendidikan harus tertata dengan baik.⁴⁴

Kemudian, pada dasarnya pengertian kualitas dalam istilah lain yaitu mutu adalah beragam sesuai dengan siapa yang mendefinisikan, para pakar pun memiliki perbedaan dalam memberikan gambaran tentang mutu. Salah satu pakar tersebut adalah Philip Crosby yang terkenal dengan dua idenya mengenai mutu. *Pertama*, bahwa mutu adalah gratis, artinya pemborosan dan ketidakefisienan pada sistem dapat dihemat dan dibayar oleh program peningkatan mutu. *Kedua*, bahwa kesalahan, kegagalan, pemborosan, dan seluruh hal yang tidak mencerminkan mutu dapat dihapus seluruhnya jika lembaga memiliki keinginan kuat untuk menghilangkannya.⁴⁵

Oleh karena itu, mutu dapat didefinisikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan.⁴⁶ Dengan kata lain bahwa mutu adalah sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan.⁴⁷

Ketika berusaha untuk mendefinisikan serta memahami makna mutu dalam pendidikan, maka terlebih dulu mengetahui bagian yang terpenting dari pendidikan yaitu produk serta pelanggan pendidikan itu sendiri. Produk dari pendidikan adalah pelajar atau peserta didik.⁴⁸ Peserta didik yang dihasilkan melalui proses pendidikan adalah para lulusan yang memiliki kemampuan melaksanakan perannya untuk masa yang akan datang.⁴⁹

Sebenarnya di dalam konteks pendidikan, bahwa pengertian kualitas atau mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil dari pada pendidikan itu sendiri. Lalu selanjutnya dari konteks proses pendidikan inilah yang akan melibatkan beberapa aspek, di antaranya bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi serta sumber daya lainnya yang mendukung penciptaan suasana pendidikan yang kondusif.

⁴⁴ *Ibid.*, 12-14.

⁴⁵ D. Deni Koswara, Cepi Triatna, *Manajemen Pendidikan: Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, 2015, 294.

⁴⁶ *Ibid.*, 295.

⁴⁷ Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2011), 56.

⁴⁸ *Ibid.*, 61.

⁴⁹ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 78.

Lalu ketika membahas kualitas dilihat dari sisi hasil pendidikan, maka akan mengacu pada hasil atau prestasi yang dicapai pada kurun waktu tertentu. Hasil pendidikan dapat berupa hasil test kemampuan akademis, misalnya ujian akhir sekolah, ujian nasional dan dapat pula hasil pendidikan atau prestasi bidang lainnya seperti olahraga, seni atau keterampilan.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berkualitas yaitu pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif.⁵⁰

2. Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Peningkatan Mutu

Manajemen biaya pendidikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana prasana pendidikan, pengadaan alat-alat pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, dan hal lain yang berkaitan dengan kependidikan. Secara teoritis konsep biaya pendidikan sama dengan di bidang lain, yaitu lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang lulusan.

Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan, mengalokasikan sumber dana dan mendistribusikannya sebagai fasilitas pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien.⁵¹

Manajemen pembiayaan menjadi niscaya untuk melahirkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, yaitu pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif, kondusif dan efisien.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan, mengalokasikan sumber dana dan mendistribusikannya sebagai fasilitas pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif, kondusif dan efisien. Manajemen pembiayaan merupakan keputusan secara keseluruhan aktivitas mengenai usaha dalam memperoleh dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen.

⁵⁰ Abdul Chafidz, *Sekolah Unggul Konsepsi dan Problematikanya*, (MPA No. 142, 1998), 39.

⁵¹ Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, *Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 73-74.

2. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu: keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sehingga dengan memperhatikan beberapa prinsip itu dana pendidikan bisa berdaya guna.
3. Manajemen pembiayaan pendidikan setidaknya mempunyai tiga ruang lingkup, yaitu perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan (*akunting*), dan tahap penilaian atau evaluasi (*auditing*). Tiga unsur ruang lingkup ini menjadi penting untuk mengantarkan dana pendidikan supaya berdaya guna.
4. Peningkatan mutu pendidikan adalah kemajuan yang dihasilkan dalam proses pendidikan sehingga menghasilkan kualitas dan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat pendidikan sebagaimana yang telah ditargetkan.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

Al-Qur'an al-Karim

- Agusta, Rizki, "Sentralisasi & Desentralisasi". <http://accounting-media.blogspot.co.id/2013/06/sentralisasi-desentralisasi.html>, 19-05-2018, 20.03 WIB
- Arifin, M. Ilmu pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Bakar, Abu, Taufani C. Kurniatun. Manajemen Pendidikan: Manajemen Keuangan Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Departemen Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: Mahkota, 1989.
- Chafidz, Abdul. Sekolah Unggul Konsepsi dan Problematikanya. MPA No. 142, 1998.
- Feisal, Jusuf Amir. Reorientasi Pendidikan Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Hamalik, Oemar. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Jahari, Jaja dan Amirulloh Syarbini. Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Kadarman, AM., Jusuf Udaya. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: Prenhallindo, 2001.
- Koswara, D. Deni, Cepi Triatna. Manajemen Pendidikan: Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan, 2015.
- Lincoln dan Guba. Effective Evaluation. San Fransisco: Jossey-Bass Pulisners, 1981.
- Machali, Imam dan Ara Hidayat, The Hand Book of Education Management; Teori dan Praktek Pengelolaan Sekolah/Madrasah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Mahmud. Model Model Kegiatan di Pesantren. Tangerang: Media Nusantara, 2006.
- Mujib, Abdul, et.al. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana, 2008.
- Najmudin. Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.

- Roqib, Moh. Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009.
- Rusdiana. Pengelolaan Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sallis, Edward. Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. Jogjakarta: IRCiSoD, 2011.
- Sujarweni, V. Wiratna. Manajemen Keuangan: Teori, Aplikasi dan hasil Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru, t,th.
- Tampubolon, Manahan. Perencanaan dan Keuangan Pendidikan. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Terry, George R., Leslie W. Rue. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Indonesia, Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Ula. S. Shoimatul. Buku Pintar Teori-Teori Manajemen Pendidikan Efektif, Yogyakarta: Berlian, 2013.
- Wiagustini, Ni Luh Putu. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Bali: Udayana University Press, 2010.
- Zamroni. Meningkatkan Mutu Sekolah. Jakarta: PSAP Muhamadiyah, 2007.